

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alaysha Budzaina, dkk, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023.
- Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), Surabaya, 2018, *e-book*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional*, Jakarta, 2014.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, P.T. Alumni, Bandung, 2014.
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, Cetakan I, IAIN Antarsari Fress, Banjarmasin, 2014.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, SCOPINDO Media Pustaka, Surabaya, 2021.
- M. Syukran Yamin dan Faisal Riza, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Pertama, UMSU Press, Medan, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, KENCANA, Jakarta, 2023.
- Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Cetakan I, IMTIYAZ, Surabaya, 2017.
- Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara kepailitan*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Cetakan I, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, *e-book*.

Philip R. Wood, *Principles of International Insolvency*, Edisi Kedua, Sweet & Maxwell Limited, London, 2007.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kelima (Edisi Revisi), Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007.

Ridwan Khairandy, dkk, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media dan Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 1999.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua Cetakan ke-10, PT Rajagrafindo Perdada, Depok, 2019.

Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin, *Hukum Kepailitan dalam Islam*, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2022.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, *e-book*.

Yulia, *Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Aceh, 2018.

Jurnal

Adi Satrio, dkk, “Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”, *Ganesha Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.

Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis, “Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Edisi No. 3 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024.

Alusianto Hamonangan, dkk, “Peranan Kurator terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU ADA*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Darma Agung, 2021.

Arivan Halim, “Prinsip Resiprositas dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Edisi No. 4 Vol. 17, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2023.

- Asdian Taluke, “Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkrah) atas Perintah hakim di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”, *Lex Privatum*, Edisi No. 4 Vol. I, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- Claudio Euaggelion Mariust Sumampouw, dkk, “Prinsip Kedaulatan Negara terhadap Intervensi Asing dalam Masalah Separatisme di Wilayah Papua Menurut Hukum Internasional”, *Lex Crimen*, Edisi No. 4 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2022.
- Desi Ratnasari, dkk, “Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat)”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Edisi No. 3 Vol. 4, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Dicky Moallavi Asnil, “UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN”, *Undang: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Dinda Rizqiyatul Himmah, “Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Edisi No. 2 Vol. 34, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *MIMBAR HUKUM*, Edisi No. 1 Vol. 21, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Hikmahanto Juwana, “Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 3 Vol. 31, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Ida Nadira, “Studi Komparatif terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Jennifer Royhan, “Komparasi Prinsip Cross-Border Insolvency dari UNCITRAL Model Law dan The Eu: Reformasi Kepailitan di Indonesia”, *Studi Hukum Kritis dan Masyarakat*, Vol 1 No. 01, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024.
- Jihan Amalia, “Urgensi Implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

- Lia Nopiharni Puspitasari S, dkk, “Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam *Cross Border Insolvency*”, *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021.
- Lili Naili Hidayah, “Indikator Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2016.
- Loura Hardjaloka, “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara”, *YURIDIKA*, Edisi No. 3 Vol. 30, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.
- M. Rendy Rifki Putra, “Eksekusi Putusan Pailit Atas Perusahaan Modal Asing di Indonesia”, *Istinbah : Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Mariatul Fitriah, “Eksekusi *Boedel* Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No. 2 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2024.
- Mochamad Cholil, “Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan *Association of Southeast Asian Nations*”, *Media Iuris*, Edisi No. 3 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2023.
- Moh. Harish Mubrizul Haq, dkk., “*Model Law on Cross Border Insolvency* dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Edisi No. 2 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2023.
- Muhammad Romli, “Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Institut Pesantren K.H. Abdul Chalim, 2021.
- Muhamad Subhi Apriantoro, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Edisi No. 3 Vol. 7, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Okta Putri Setia Ningtias, “Kewenangan Kurator dalam Mengeksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*)”, *Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Edisi No. 2 Vol. 22, Universitas Surabaya, 2024.
- Phireri, dkk, “Analisis terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata”, *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Institut Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2022.

- Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, “Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Berdasarkan UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* di ASEAN”, *Belli ac Pacis*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Prayogo Hindrawan, dkk. , “Tanggung Jawab Kurator Menerapkan Asas Pari Passu Protata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Edisi No. 8 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2023.
- Prisilia Anggraini Evelyn Terisno dan Yuliana Angela, “Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana dalam Suatu Objek Perkara yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)”, *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.
- Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, “Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara”, *Arena Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.
- Respati Damarjati, dkk, “Analisis Pembentukan Asean *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean”, *Privat Law*, Edisi No. 1 Vol. V, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Rio Adhitya, “Analisis Pembentukan ASEAN *Cross-Border Insolvency Regulation* sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Sriwijaya, 2021.
- Rizka Rahmawati, “Eksekusi Aset Debitor yang Berada di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan”, *SASI*, Edisi No. 2 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.
- Ronald Saija, “Perspektif Sanksi Pidana Kurator Menurut Hukum Kepailitan”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021.
- Siti Khairunnisa, “Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia”, *Recht Studiosum Law Review*, Edisi No. 01 Vol. 03, Universitas Sumatera Utara, 2024.
- Tasuji Wirismalawati dan Anak Agung Sri Utari, “Penerapan UNCITRAL terhadap Penyelesaian Perkara Kepailitan Lintas Batas Negara Studi Kasus Kepailitan *Fairfield Sentry Limited*”, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Edisi No. 05 Vol. 05, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Viva Orchita, dkk., “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia (*Studi Loan Agreement* dan Republik Indonesia dan *Nordea Bank Danmark a/s* (Denmark)”, *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

Warsono, “Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *STIE Ganesha Press*, Edisi No. 2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2017.

Wawan Andriyanto, “Urgensi Pengaturan Taflis dalam Undang-Undang”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2023.

Makalah

Abdul Manan, “Eksekusi & Lelang dalam Hukum Acara Perdata”, makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), Mahkamah Agung, Jakarta, 11 – 18 September 2011.

Perundang-Undangan

Algemene Bepalingen van wetgevin.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Kode Etik Asosiasi dan Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Quran Surah Al-Baqarah.

Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation.

Putusan

Putusan Pengadilan Niaga pada	Pengadilan Negeri	Jakarta	Nomor
021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst	jo.		Nomor
78/PAILIT/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst.			

Data Elektronik

Anggar Septiadi, 2018, Revisi UU Kepailitan upayakan *Cross Border Insolvency*, terdapat dalam <https://amp.kontan.co.id/news/revisi-uu-kepailitan-upayakan-cross-border-insolvency> Diakses pada hari Senin, 11 November 2024, Pukul 16.11 WIB.

Ilman Hadi, 2012, Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya--lt50c7fbf57efb8/> Diakses pada hari Sabtu, 27 April 2024, Pukul 00.31 WIB.

Ryano Rahadian dan Maria Ulfa, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Melalui Gugatan Re-Litigasi, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-putusan-pengadilan-asing-melalui-gugatan-re-litigasi-lt63f749c749ef9/?page=2> Diakses pada hari Sabtu, 18 Januari, Pukul 12.14 WIB.

United Nations Commission On International Trade Law, https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency Diakses terakhir pada hari Senin, 30 November, Pukul 03.40 WIB.

Hasil Penelitian

Aditya Naufal Ihsan, “Implementasi Pemberesan Utang Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Progam Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

Anggitya Mahasari, “Pemberesan Harta Debitor Pailit dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*) yang Diputuskan oleh Pengadilan Niaga Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Dian Asriani Lubis, Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2011.

Dicky Moallavi Asnil, “UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Interaksi Ekonomi ASEAN”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

M. Ali Husaen Mubaroq, “Rekonseptualisasi Materi Hukum Kepailitan untuk Memberikan perlindungan Hukum terhadap Debitor Berbasis Asas Keseimbangan”, *Tesis Fakultas Hukum*, Program Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Nadhira Andri Putri, “Kewenangan Kurator dalam Mengeksekusi *Boedel* Pailit di Luar Batas Yurisdiksi Indonesia”, *Thesis Fakultas Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2018.